

Studi Komparasi: Inovasi Bansos Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

Wiwin Januaris¹ ; Endang Sri Rejeki²

Pendidikan Luar Sekolah/ Fakultas Ilmu Pendidikan/ Universitas Negeri Malang^{1,2}

*) januariswiwin@gmail.com

Abstrak

Latar belakang adanya program bansos tentunya lahir dari adanya sebuah kondisi ketidakmampuan, ketidakberdayaan yang disebabkan oleh kemiskinan. Pemerintah telah mengalokasikan dana untuk dialokasikan pada program bantuan social. Program bantuan social jenisnya bermacam-macam. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mensejahterakan rakyatnya. Tujuan penulisan dari artikel ini yaitu; (1) Mendeskripsikan program-program yang saat ini disalurkan pada masyarakat yaitu BLT BBM, BLT subsid upah, bansos PBI JK, BLT dana desa, BLT UMKM, program kartu pra kerja, bantuan pokok non tunai (BPNT), dan program keluarga harapan (PKH); (2) Menjabarkan program inovasi yang ada dalam program keluarga harapan

Kata kunci: bansos, pkh, inovasi

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat saat ini menjadi prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Menurut Noor (2011) menyatakan bahwasannya pemberdayaan masyarakat merupakan rancangan pembangunan ekonomi yang merangkum nilai- nilai masyarakat untuk membangun paradigma terkini dalam pembangunan yang bersifat *people-centered participatory*, Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pemerintah untuk menyediakan warga lokal dalam merancang, menyudahi serta mengatur sumberdaya yang dipunyai alhasil pada kesimpulannya mereka mempunyai keahlian serta independensi dengan cara

ekonomi, ilmu lingkungan serta sosial dengan cara berkepanjangan. Oleh sebab itu pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya berhubungan akrab dengan sustainable development yang menginginkan pra- syarat keberlanjutan independensi warga dengan cara ekonomi, ilmu lingkungan serta sosial yang senantiasa energik.

Pemberdayaan masyarakat akan lebih efektif bila dilakukan dari lingkup yang paling kecil. Informasi ataupun pengetahuan yang disampaikan akan lebih mengena dan memudahkan system control ketercapainnya. Menurut Friedmann dalam Mardi (2000), pemberdayaan harus dimulai dari rumah tangga. Salahsatu upaya pemerintah dalam rangka mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat prasejahtera yakni melalui program bantuan social (bansos). Menurut (Wildan, dkk: 2020) pemberian bantuan sosial kepada warga sesungguhnya bukan hal yang baru dicoba oleh pemerintah. Dalam kondisi adanya bencana disuatu wilayah, misalnya, bantuan sosial ini kerap dicoba oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah wilayah tetapi respon masyarakat atas realisasi yang terjalin sedang banyak menimbulkan kekesalan atas penyalurannya. Walaupun begitu, program bansos tetap memberikan dampak yang baik yakni meringankan beban pengeluaran dalam rumah tangga prasejahtera.

Kebijakan pemerintah terkait bantuan social kepada masyarakat dari masa ke masa selalu berubah dan memberikan sentuhan inovasi tersendiri. Hal ini dilakukan agar masyarakat menjadi lebih sejahtera. Setiap kebijakan pastinya memberikan pengaruh atau dampak yang berbeda-beda. Pemberian bantuan sosial pada masyarakat menimbulkan 2 mata pisau yang berbeda. Sisi yang pertama, bantuan dapat meringankan beban masyarakat. Sisi kedua, bantuan menjadikan masyarakat menjadi malas untuk berusaha. Maka dari itu pemerintah terus berusaha untuk berinovasi agar bantuan tetap dapat meringankan beban masyarakat namun tidak membuat masyarakat menjadi malas atau ketergantungan dengan bantuan ini.

Tujuan penulisan dari artikel ini yaitu; (1) Mendeskripsikan bermacam-macam bantuan yang saat ini disalurkan pada masyarakat yaitu BLT BBM, BLT subsidi upah, bansos PBI JK, BLT dana desa, BLT UMKM, program kartu pra kerja, bantuan pokok

non tunai (BPNT), dan program keluarga harapan (PKH); (2) Menjabarkan program inovasi yang ada dalam program keluarga harapan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah melalui beberapa kementerian yang ditunjuk telah mengeluarkan beberapa jenis bantuan dengan syarat, kriteria, sasaran dan program yang berbeda-beda. Saat ini adapun beberapa bansos yang sedang disalurkan oleh pemerintah diantaranya yakni: Bansos PBI JK, BLT Dana Desa, BLT BBM, BLT Subsidi Upah (BSU), BLT UMKM, Bantuan kartu Pra Kerja, BPNT, dan PKH.

Pertama, bansos PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) atau yang sering disebut Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan bantuan yang validasinya dilakukan oleh kemensos dalam bidang kesehatan dan diberikan pada keluarga prasejahtera. Penerima bansos ini akan mendapatkan layanan kesehatan secara gratis di faskes yang telah disediakan. Pemerintah akan membayarkan iuran rutin agar penerima tidak lagi memikirkan biaya saat menggunakan layanan kesehatan. Penerima bansos PBI JK harus terdata dalam database kemiskinan yakni aplikasi SIKS-NG. Bilamana ada warga yang dulunya menerima bantuan ini lalu dihapus atau di non-aktifkan dalam data SIKS-NG karena alasan tertentu maka secara otomatis kartu PBI nya akan menjadi tidak aktif dan harus beralih menjadi kartu BPJS mandiri yang berbayar setiap bulannya. Kedua, BLT Dana Desa adalah bantuan yang diberikan pada saat covid-19 dan pasca covid-19. Bantuan ini diambilkan dari anggaran dana desa dengan kriteria masyarakat miskin, kehilangan pekerjaan, dan belum mendapat bantuan lainnya. Ketiga, BLT BBM adalah program bansos yang ditujukan pada masyarakat prasejahtera melalui kementerian social RI akibat dari adanya kenaikan BBM. Jumlah bantuan yang diberikan yaitu sejumlah Rp. 600.000,- per penerima manfaat dengan skema dua kali pencairan. Masing-masing tahap pencairan sejumlah Rp 300 ribu per penerima manfaat. Keempat, BLT SUBSIDI UPAH (BSU) merupakan program bansos yang diberikan oleh kementerian ketenagakerjaan (KEMENAKER) yang bekerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan. Bantuan ini juga termasuk dalam bansos yang

sangat diminati oleh masyarakat utamanya bagi para karyawan swasta yang gajinya di bawah 3,5 juta/bulan atau disesuaikan dengan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) atau kabupaten/kota. Kelima, BLT UMKM ialah program BLT dari pemerintah untuk pelaku Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM). Besaran nilai BLT UMKM yang akan dicairkan adalah sebesar Rp 600 ribu. Bantuan ini diberikan pada para pelaku UMKM salahsatu tujuannya adalah untuk membantu UMKM tetap survive disaat BBM terus mengalami kenaikan. Keenam, bantuan Kartu Pra Kerja yakni bantuan berupa uang tunai yang diberikan pada para pencari kerja atau karyawan yang telah di PHK dari perusahaan namun dengan syarat harus mengikuti pembelajaran di sebuah platform pada waktu yang telah ditentukan. Ketujuh, BANTUAN POKOK NON TUNAI (BPNT) merupakan pemberian bantuan berupa saldo dalam rekening ATM KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) dan saldo tersebut hanya bisa ditukarkan dengan sembako pada e-warong atau toko agen yang telah ditunjuk. Nominal bantuan ini yaitu Rp.200 ribu per bulan dan tidak bisa diuangkan, hanya bisa ditukarkan dengan sembako. Sembako yang dimaksud wajib mengandung karbohidrat, protein hewani/nabati, sayur mayor dan buah. Bantuan ini diberikan oleh kemensos RI untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdaftar dalam data SIKS-NG dan DTKS. Kedelapan, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan berupa uang tunai yang diberikan oleh keluarga miskin dengan syarat tertentu. Syaratnya yaitu memiliki komponen anak sekolah, komponen kesehatan, dan komponen kesejahteraan social. Tujuan dari program ini adalah memutus rantai kemiskinan. Keluarga penerima manfaat (KPM) program ini wajib mengikuti pertemuan kelompok rutin yang dilaksanakan oleh pendamping PKH yang disebut dengan kegiatan P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga).

Bantuan social PKH berbeda dengan bantuan yang lainnya. Bila bansos lainnya hanya memberi bantuan berupa uang, lain dengan PKH yang memberikan pendampingan khusus berbasis keluarga. Pendamping PKH akan membuat kelompok-kelompok kecil dengan jumlah sekitar 15-25 orang KPM yang pengelompokannya akan di sesuaikan dengan kondisi geografis tempat tinggal KPM.

Pertemuan kelompok tersebut akan dihadiri oleh pendamping 1 kali dalam setiap bulannya. Pertemuan tersebut juga biasa disebut dengan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau disebut juga dengan Family Development Session (FDS). Dalam pertemuan P2K2 pendamping akan menyampaikan tentang informasi-informasi terkini seputar kebijakan dari KEMENSOS dan juga memberikan edukasi terkait materi yang dibutuhkan oleh KPM. Materi P2K2 diantaranya tentang pendidikan dan pengasuhan anak, pengelolaan keuangan keluarga, gizi dan kesehatan ibu hamil dan menyusui, perlindungan anak, seputar disabilitas, lansia, dll.

Selain materi edukasi dan informasi, pendamping PKH juga dapat memberikan pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan potensi sumber daya manusia ataupun sumber daya alam daerah dampungannya. Untuk pemberdayaan masyarakat berupa pengadaan kegiatan peletihan, pendamping dapat bekerjasama dengan stakeholder lainnya. Misalkan saja pihak Balai Latihan Kerja setempat atau praktisi dalam bidangnya. Namun bila pendamping memiliki skill dan kapasitas yang mumpuni, maka hal itu juga bisa dilakukan oleh pendamping itu sendiri. Inilah inovasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan sentuhan berbeda dalam bantuan PKH.

Adanya program bansos tentunya lahir dari adanya sebuah kondisi ketidakmampuan, ketidakberdayaan yang disebabkan oleh kemiskinan. Amatan mengenai uraian kekurangan yang penting serta menyeluruh amat dibutuhkan buat menguasai serta mencari uraian supaya tidak terjalin salah urus pada saat menanggulangnya. Suparlan (1984) dengan cara singkat menarangkan kemiskinan selaku sesuatu standar tingkatan hidup yang kecil ialah terdapatnya sesuatu tingkatan kekurangan modul pada beberapa ataupun sekeluarga orang dibanding dengan standar kehidupan yang biasa legal dalam masyarakat yang berhubungan. Kemiskinan tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Di Negara maju pun juga ada masalah kemiskinan. Hanya saja angkanya tidak terlalu banyak. Kemiskinan ialah permasalahan biasa serta sudah jadi bahaya dan musibah untuk sesuatu Negara (Khalif: 2020). Amatan mengenai uraian kemiskinan yang penting serta menyeluruh amat dibutuhkan buat menguasai serta mencari uraian

supaya tidak terjalin salah rawat kala menanggulangnya. Bagi Suparlan (1984) dengan cara singkat menarangkan kemiskinan selaku sesuatu standar tingkatan hidup yang kecil ialah terdapatnya sesuatu tingkatan kemiskinan modul pada beberapa ataupun sekeluarga orang dibanding dengan standar kehidupan yang biasa legal dalam masyarakat yang berhubungan. Bisa jadi kondisi miskin dalam suatu wilayah dengan wilayah lain akan berbeda karena standart kehidupan masyarakat yang tidak sama. Kemiskinan bersumber pada faktornya bagi Baswir (1997) dibagi jadi 3 ialah kemiskinan kultural, kemiskinan sistemis, kekurangan alami. Ketiganya memiliki karakter dan factor penyebab yang berbeda-beda.

Program-program bansos yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yakni Bansos PBI JK, BLT Dana Desa, BLT BBM, BLT Subsidi Upah (BSU), BLT UMKM, Bantuan kartu Pra Kerja, BPNT, dan PKH memiliki tujuan dan sasaran yang berbeda-beda namun tetap pada intinya yaitu untuk masyarakat dengan kondisi miskin. Sesuai dengan jenis kemiskinan, kemiskinan struktural adalah keadaan miskin yang dialami oleh masyarakat dan bersumber dari struktur sosial. Kemiskinan kultural lebih pada adat, Kerutinan serta nilai- nilai yang dianut oleh warga semacam berat kaki serta lemahnya etos kegiatan. Sedangkan kemiskinan natural kemiskinan yang terjalin sebab kondisi alam yang miskin ataupun sangat jarang pangkal energi alam (SDA), alhasil daya produksi warga jadi kecil.

Adapun beberapa contoh penyalahgunaan bansos seperti yang diungkapkan oleh Herdiana, dkk (2021) yakni perihal kebijaksanaan BLT Anggaran Desa yang diucap di satu bagian diharapkan bisa memudahkan beban masyarakat yang terdampak COVID- 19, akan tetapi di bagian lain tidak dapat dibantah terdapatnya kesempatan penyalahgunaan anggaran desa yang akan terjadi baik dengan cara disengaja ataupun dengan cara tidak disengaja oleh pihak- pihak yang ikut serta dalam penyelenggaraan BLT Anggaran Desa, baik itu dari pemerintah daerah, pemerintah desa ataupun dari unsur masyarakat itu sendiri. Penyalahgunaan yang dimaksud adalah pendataan penerima yang didasarkan oleh hubungan kekerabatan dengan pemegang kekuasaan tertentu yang mengakibatkan kontroversi pada masyarakat tingkat bawah. Contoh lainnya yakni pemberian bansos BLT UMKM, menurut

Amalia (2022) semenjak program ini dilaksanakan, sudah mengundang membela serta anti. Berbagai bagian dari program ini menemukan pancaran dari bermacam golongan. Disini pengarang menciptakan sebagian permasalahan antara lain keberhasilan Program Dorongan Langsung Kas (BLT) UMKM ini diamati dari bidang penerapannya dilapangan kayaknya kurang efisien. Kurang efektifnya bantuan ini yaitu karena banyak masyarakat yang pada kenyataanya tidak memiliki usaha namun tetap mendaftar dalam penerimaan program ini, sedangkan yang benar-benar memiliki usaha banyak yang tidak mendapatkan bantuan ini karena beberapa hal. Inilah yang disebut dengan kemiskinan kultural, orang akan menjadi tidak jujur, mengedepankan ego untuk mendapatkan sebuah bantuan.

Bantuan lain yang dirasa kurang maksimal dalam pelaksanaannya yakni bantuan kartu pra kerja. Menurut (Lestary: 2020) bantuan kartu pra kerja tidak bisa diharapkan untuk jadi bagian dorongan yang efisien. Pemerintah telah memberi keringanan dengan cara melaksanakan pelatihan/pembelajaran secara online agar peserta dapat dengan mudah dan fleksibel dalam pelaksanaannya. Namun pelatihan seperti ini akan sangat kurang maksimal untuk materi pelatihan yang berupa hardskill seperti menjahit, meubel, welding, merajut,dll yang notabeneanya membutuhkan pembelian alat dan praktek langsung.

Sebenarnya konsep dari masing-masing bansos itu baik, namun ada beberapa hal yang membuatnya kurang berjalan dengan baik karena beberapa factor, baik itu kaitannya dengan kemiskinan structural, kultural dan natural. Dan yang pasti dari sekian bansos tersebut tidak ada pendampingan sehingga penerima tidak mendapat edukasi yang cukup terkait bansos tersebut.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang membagikan dorongan kas pada RTSM. Selaku imbalannya RTSM diharuskan buatenuhi persyaratan yang terpaut dengan usaha kenaikan mutu sumber daya manusia (SDM), ialah pendidikan serta kesehatan. Tujuan umum PKH merupakan untuk mengurangi angka kemiskinan serta memutuskan rantai kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia, dan mengubah sikap RTSM yang relatif kurang mensupport kenaikan kesejahteraan (Departemen Sosial RI, 2009).

Bansos PKH berbeda dengan bantuan yang lainnya. Bila bansos lainnya rata-rata hanya memberikan bantuan berupa uang namun berbeda dengan program PKH. Selain KPM diberi bantuan berupa uang tunai, mereka juga mendapat pendampingan khusus dari pendamping PKH. Pendamping PKH membantu Peserta PKH untuk mengolah bantuan, dan memberikan penyuluhan kepada Peserta PKH untuk mengembangkan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing Peserta PKH. Ini adalah sebuah inovasi yang baik. Ketimpangan dari permasalahan bansos seringkali terpublish di media sehingga menjadi bahan evaluasi tersendiri dari pemangku kebijakan untuk membuat inovasi yang berbeda dalam bansos PKH ini. Dan bansos PKH saat ini juga menjadi bansos yang paling dikenal masyarakat karena informasinya yang banyak ditemui di media.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 1 Tahun 2018 Mengenai Program Keluarga Harapan, dalam artikel 6 determinasi diartikan, Keluarga Akseptor Khasiat (KPM) PKH berkuasa memperoleh: a) Dorongan Sosial PKH; b) pendampingan PKH; c) jasa di sarana kesehatan, pembelajaran, serta atau ataupun keselamatan sosial; serta d) program Dorongan Komplementer di aspek kesehatan, pembelajaran, bantuan tenaga, ekonomi, perumahan, serta keinginan bawah yang lain. Keluarga akseptor PKH wajib penuhi patokan bagian yang terdiri dari bagian kesehatan, pembelajaran, serta keselamatan sosial.

Dalam program PKH, KPM tidak dijadikan obyek dari proyek pembangunan tetapi merupakan subyek dari pembangunannya sendiri. Bantuan hanya sebagai stimulus dan pendamping hanyalah fasilitator. KPM lah yang dapat menolong dirinya sendiri agar mentas dari kemiskinan. Menurut Noor: 2011 konsep pemberdayaan masyarakat sebagai model pembangunan pendekatan yang dipakai adalah: Pertama, targeted maksudnya upayanya wajib terencana pada yang membutuhkan dengan program yang didesain buat menanggulangi perkaranya serta cocok kebutuhannya. Kedua, melibatkan apalagi dilaksanakan oleh warga yang jadi target. Tujuannya merupakan biar dorongan efisien sebab cocok keinginan mereka yang sekalian tingkatkan keberdayaan (empowering) warga dengan pengalaman dalam mengonsep, melakukan, mengatur serta mempertanggung jawabkan usaha

kenaikan diri serta ekonominya. Ketiga, memakai pendekatan golongan, sebab dengan cara perseorangan warga miskin susah membongkar perkaranya sendiri. Disamping itu kemitraan upaya dampingi golongan dengan golongan yang lebih bagus silih profitabel serta memajukan golongan.

Desain program PKH yang dikonsep dengan adanya pendampingan khusus maka kehadiran pendamping diperlukan karena masyarakat miskin biasanya mempunyai keterbatasan dalam pengembangan diri dan kelompoknya. Menurut Andi Nu Graha (2009) pendamping sosial hadir sebagai agen perubahan yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi mereka.

Pendampingan social dengan begitu bisa dimaksud selaku interaksi energik antara golongan miskin dan pekerja social untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan semacam: 1) Mengonsep program koreksi kehidupan sosial ekonomi; 2) Mengerahkan pangkal energi setempat; 3) Membongkar permasalahan sosial; 4) Menghasilkan ataupun membuka akses untuk pelampiasan keinginan; 5) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konsep pemberdayaan masyarakat.

Dalam kegiatan pemberdayaan PKH ada beberapa kelompok produktif yang berperan penting dalam menambah pengalaman, pengetahuan dan skill dari KPM PKH. Menurut Sofianto (2020) Peran kelompok PKH, Golongan Upaya Bersama (KUB), serta e-warong menyediakan pemberdayaan warga semacam penataran pembibitan, sarana upaya, fasilitasi alat penciptaan serta pasar, dan jejaring sudah dilaksanakan oleh golongan itu. Output dari bansos ini yakni perubahan mindset dan perilaku KPM. Dengan produktifitas yang dimiliki, harapannya KPM dapat lebih mandiri dan dapat mensejahterakan kehidupannya yang lebih baik.

Fungsi pendidikan luar sekolah yang dirangkum dalam kegiatan embelajaran nonformal-informal yang ada dala P2K2 ini memberikan pengalaman belajar yang tidak diperoleh dalam pendidikan formal di sekolah. Isi atau materi kegiatan didasarkan atas kebutuhan peserta didik. Serta kegiatan dirancang dan dilakukan oleh pendamping PKH yang bekerja sama dengan pihak terkait, entah itu berupa pendidikan keterampilan produktif, materi khusus, dll sesuai kebutuhan KPM.

Ikatan pembelajaran luar sekolah dan pemberdayaan dalam perihal ini bagi Syamsi (2010) merupakan sesuatu metode buat menggali sesuatu cara berlatih golongan warga serta belajar dengan cara analitis buat tingkatan kompetensi serta kemampuan mereka dalam profesinya saat ini serta mempersiapkan diri buat andil serta tanggungjawab yang hendak tiba, dengan memaknai belajar mengetahui (*learning to know*), belajar berbuat (*learning to do*), belajar hidup bersama (*learning to live together*), dan belajar menjadi seseorang (*learning to be*) secara bersamaan dan berkesinambungan. Dapat disimpulkan bahwa kehiatan P2K2 da pemberdayaan PKH ini cukup baik dilakukan karena dapat mendorong percepatan graduasi/pemutusan bantuan pada KPM. Ketika KPM telah mampu membantu dirinya sendiri menjadi lebih mandiri sejahtera maka artinya keberhasilan program ini juga akan semakin tinggi angka pencapaiannya.

SIMPULAN

1) Setiap program bansos yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki tujuan yang berbeda-beda. Memiliki kelemahan dan kelebihan yang berbeda-beda pula. Ketimpangan dari permasalahan tersebut diakibatkan oleh beberapa factor baik itu karena permasalahan dari kemiskinan structural, kultural dan natural; 2) Dari sekian program yang ada, PKH adalah satu-satunya program bansos yang di design dengan sangat terstruktur. Program ini tidak hanya sekedar memberikan bantuan uang tunai saja, namun pemerintah memberikan inovasi sentuhan yang berbeda yakni adanya pembinaan, pemberdayaan, dan pendampingan terhadap keluarga. Tujuannya yaitu agar keluarga tersebut dapat lebih mandiri dan dapat menolong dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Cahyo dan Ertien. 2019. Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu (*Journal of Public Sector Innovation*). Vol. 3, No. 2, Mei Tahun 2019, (68 - 74)

- Antoni. (2004). Riuhnya Persimpangan Itu: Profil dan Pemikiran Para Penggagas Kajian Ilmu Komunikasi. Solo: Tiga Serangkai
- Daryanto. 2014. Teori Komunikasi. Malang: Gunung Samudera
- Santoso, W. M. 2014. Ilmu Sosial di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Haryadi,Toto. 2018. Adaptasi Teori Difusi-Inovasi dalam Game “Yuk Benahi” Dengan Pendekatan Komunikasi Smcr. Jurnal Audience, Vol I No. 1.
- Noor, Munawar. 2011. Pemberdayaan Masyarakat (Jurnal Ilmiah CIVIS). Volume I, No 2, Juli 2011
- Nu Graha, Andi. 2009. Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi. (Jurnal MODERNISASI, Volume 5, Nomor 2, Juni 2009)
- Mardi Yatmo Hutomo, 2000, Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi : Tinjauan Teoritik dan Implementasi, Naskah No.20 Juni-Juli
- Lestary,dll. 2020. Bantuan Sosial ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran?CSIS Commentaries ECON-002-ID
- Wildan,dkk. 2020. Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia. (Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol. II,No.1),(2020),Hal.90-102
- Departemen Sosial Republik Indonesia. (2009) Pedoman Umum PKH. Jakarta.
- Suparlan, Parsudi. 1984. Kemiskinan di Perkotaan. Jakarta, Sinar Harapan dan Yayasan Obor Indonesia.
- Baswir, Revrison. 199. Agenda Ekonomi Kerakyatan. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Kholif,Khodiziah Isnaini,dkk. 2020. Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4, Hal. 709-714
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018
- Sofianto,Arif. 2020. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah. SOSIO KONSEPSIA: Jurnal

- Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol 10, No 1 (2020): hal 14 – 31
- Herdiana,Dian, dkk. 2021. Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan. JURNAL INSPIRASI Vol . 12 N o.1 , Juni 2021
- Rizky Amalia (2022) Efektivitas Pemberian Dana Bantuan Langsung Tunai Umkm Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Kelurahan Pemurus Dalam. Skripsi, Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Silalahi,dkk. 2021. Tujuan, Fungsi Dan Asas Pendidikan Luar Sekolah Dalam Sistem Pendidikan. PEMA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 1, No. 2 Tahun 2021 | Hal. 71-74
- Syamsi,Ibnu.2010. Pendidikan Luar Sekolah dalam Pemberdaya Masyarakat. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah Vol 14, No 1 (2010)